

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PAGENTAN
TAHUN 2024
(PENYELARASAN)



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

Contents

DAFTAR ISI2

BAB I PENDAHULUAN.....3

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ...10

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....46

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....51

BAB V PENUTUP54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (lembaran Negara tahun 2014 nomor 244)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana

- Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
26. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 14);
27. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 15);
28. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk:

- a. Menjabarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2024 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2024 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024;
- b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2024;
- c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2024.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan pemerintahan unsur Kewilayahan Bidang Urusan Kecamatan.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 terdiri dari 5 program, 8 kegiatan, dan 12 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.826.943.475,00, dengan fokus utama pada mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good government) dalam kehidupan berpolitik yang demokratis dan bertanggung jawab. Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

- 1. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik;**
- 2. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga professional.**

Dari 7 program, 8 kegiatan, dan 12 sub kegiatan yang dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2022 terdiri dari 5 program, 8 kegiatan, dan 12 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 1.826.943.475,00.

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 5 program, 8 kegiatan, dan 12 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 1.724.820.129,- Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2022, program/kegiatan/subkegiatan yang bertambah meliputi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan sebesar Rp 3.560.000,00. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp 8.566.400. Sedangkan program/kegiatan/subkegiatan yang berkurang meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp 112.589.746,00, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp 1.200.000,00. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sub kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa sebesar Rp 460.000,00.

Dinamika yang terjadi selama tahun 2022 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2022, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target maupun yang tidak memenuhi target.

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Adanya aplikasi kependudukan online yang dapat diakses oleh semua warga masyarakat yang membutuhkan data Kependudukan. Hal tersebut berdampak pada berkurangnya pemohon untuk pelayanan KTP dan KK.
 2. Semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam hal administrasi sehingga pelayanan perijinan seperti dispensasi nikah, surat-surat keterangan menurun, sehingga ke depan target capaian kinerja untuk kegiatan tersebut perlu diselaraskan kembali.
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, sedangkan realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah nihil. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Adanya perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring yang baik.
2. Menyelaraskan hal-hal yang akan dikerjakan dengan target kinerja
3. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang akan dikerjakan
4. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja
5. Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab ketidaktercapaian, diantaranya:

1. Koordinasi antar Kasi dan Sub Bagian
2. Prioritas Perencanaan yang tepat sasaran, agar kegiatan bisa berjalan sesuai perencanaan

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s.d. Tahun 2022* Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Persnrgkat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		Daerah								
7.01.01. 2.02.01	Penyedia gaji dan tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan yang terbayarkan	11 Orang	11 Orang	11 Orang	11 Orang	100%			
7.01.01. 2.02.03	Pelaksanaan penatausahaa n dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan	7 orang	7 orang	7 orang	7 orang	100%			
7.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01. 2.06.04	Penyedia bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik yang terpenuhi	13 paket	13 paket	13 paket	13 paket	100%			
7.01.01. 2.08	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01. 2.08.02	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran Listrik, Air dan Internet	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
7.01.01. 2.08.04	Penyedia jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Jasa pelayanan umum kantor yang terbayarkan	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	100%			
7.01.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daaerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan Dinas, yang terpelihara dan terbayarkan	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	100%			

	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pajaknya								
7.01.01. 2.09.10	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	100%			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Pelayanan Administrasi Kependudukan sesuai ketentuan, Prosentase SPPT PBB Yang Tersalurkan Ke Wajib Pajak	100%	100%	100%	100%	93,98%	100%	100%	100%
7.01.02. 2.04	Pelaksanaan Urusan	Prosentase pelaksanaa	100%	100%	100%	100%	93,98%	100%	100%	100%

	Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	n urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat								
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah pelayanan KTP yang sesuai ketentuan, Jumlah Pelayanan KK yang sesuai ketentuan, Jumlah Pelayanan Perijinan Non Usaha yang sesuai ketentuan	2000 dok	2000 dok	2000 dok	2000 dok	87,97			
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait	Jumlah SPT PBB yang tersalurkan ke wajib	37640 WP	37414 WP	37640 WP	37519 WP	100%			

	dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	pajak								
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELUARAHAN	Prosentase pemberdayaan masyarakat desa dan keluarahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Pemberdayaan desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.05.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah desa yang meningkat efektifitas pemberdayaannya	16 desa	16 desa	16 desa	16 desa	100%			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.05.	Penyelenggar	Prosentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.01	aan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Pemerintahan sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah								
7.01.05. 2.01.08	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Dikecamatan yang terlaksana	6 rumusan	6 rumusan	6 rumusan	6 rumusan	100%			
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Tertib Administrasi Pemerintahan desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.06. 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan	Persentase Fasilitasi, Rekomenda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	si dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah an Desa yang terlaksana								
7.01.06. 2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang tertib administras i pembangun an	16 desa	16 desa	16 desa	16 desa	100%			

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu 3 Indikator. Dari 3 indikator tersebut, 2 berstatus tercapai dan 1 indikator berstatus tidak tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Merencanakan target kinerja;
2. Menyelaraskan dokumen perencanaan sehingga data yang disajikan merupakan data yang akuntabel;
3. Koordinasi internal perangkat daerah belum maksimal sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan yang ada.
4. Koordinasi Pemerintah Kecamatan dan Desa yang telah berjalan dengan baik;
5. Kekompakan Tim Pemungut Pajak dalam pelaksanaan tugas;

Dalam rangka mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya yang meliputi:

1. Mengevaluasi, menelaah, menyelaraskan dokumen perencanaan agar tercapai target kinerja;
2. Mengevaluasi dan memperbaiki komunikasi serta koordinasi internal perangkat daerah sehingga kegiatan dapat berjalan selaras dengan perencanaan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik.

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Nilai IKM		-	83,20				81,64	81,23	83,20	85,05	
2.	Nilai SAKIP			56	56	65,1	65,2	36,32	29,80	CC (56)	B (63,20)	
3.	Persentase pelunasan PBB							100%	100%			

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/20

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam 1 urusan, yaitu Urusan Kewilayahan. Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPD Tahun 2023-2026, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2024 mencakup 1 urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Belum optimalnya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada camat
2. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai;
3. Masih Minimnya fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan publik.
4. Gedung Kantor dan sarana prasarana pendukung gedung kantor kurang memadai.
5. Masih kurangnya dukungan data informasi dari masyarakat, peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;
6. Masih rendahnya keselarasan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang ada;
7. Masih rendahnya pemahaman masyarakat maupun aparatur desa tentang hakekat pembangunan nasional;
8. Masih kurangnya kapasitas aparatur desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan desa;
9. Masih kurangnya keseriusan masyarakat dan petugas pemungut dalam pelunasan PBB lebih awal;

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Kurang tercapainya suatu kegiatan sesuai indikator kinerja

2. Tidak tercapainya sasaran kerja
3. Belum optimalnya hasil pekerjaan

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

1. Kondisi geografis wilayah kecamatan yang berbukit-bukit dan tanah yang labil/ mudah bergerak mengakibatkan kerusakan infrastruktur transportasi dan bencana alam tanah longsor kerap kali terjadi sehingga menghambat mobilitas ekonomi dan sosial masyarakat.
2. Tuntutan masyarakat semakin beragam untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas.
3. Masih adanya aparat pemerintahan dan kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif.
4. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan pelayanan terhadap masyarakat
5. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
6. Melimpahnya potensi sumberdaya alam yang dapat dikelola untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
7. Mudah akses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme.
8. Adanya dukungan koordinasi lintas sektor di wilayah kecamatan yang mendukung tercapainya sinkronisasi dan integrasi kegiatan lingkup kecamatan antara lain kegiatan Konferensi dinas/rapat koordinasi Forkompinca, UPT/Instansi dan Kepala Desa secara rutin di tingkat Kecamatan.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2024 didapatkan dari hasil analisis

kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2022. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Masih belum optimalnya tata Kelola pemerintahan. Hal ini ditandai oleh nilai skor SAKIP C.
2. Masih lemahnya pemahaman aparatur terhadap tupoksi dan koordinasi antar seksi dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
3. Masih tingginya kemiskinan dan pengangguran. Wilayah Pagentan termasuk salah satu kecamatan yang terdapat desa dengan angka kemiskinan ekstrem.
4. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana baik secara kualitas maupun kuantitas.
5. Rawan bencana alam tanah longsor.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun kedua RPD Tahun 2023-2026. Dalam RPD Tahun 2023-2026, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2024 meliputi:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Meningkatnya kualitas layanan publik

Tabel 2
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	kec pagentan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana	100%	2.520.600. 000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	kec pagentan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terlaksana	100%	2.510.000. 000	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat daerah	kec pagentan	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	11.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	kec pagentan	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	4.500.000	

			Perangka t Daerah yang disusun			a Peran gkat daera h		Perangka t Daerah yang disusun			
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	kec pagentan	Jumlah Dokume n perencan aan perangka t daerah	8 dokume n	5.000.000	Penyu sunan Doku men Perenc anaan Peran gkat Daera h	kec pagen tan	Jumlah Dokume n perencan aan perangka t daerah	8 dokume n	2.000.000	
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kineja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	kec pagentan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordina si Penyusu nan Laporan Capaian	5 laporan	6.500.000	Koordi nasi dan Penyu sunan Lapor an Capai an Kineja dan Ikhtis ar Realis asi Kinerj a SKPD	kec pagen tan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordina si Penyusu nan Laporan Capaian	5 laporan	2.500.000	

			Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	kec pagentan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	2.071.900.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	kec pagentan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	2.058.300.000	
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	kec pagentan	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 orang/bulan	2.000.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	kec pagentan	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 orang/bulan	1.991.300.000	
b	Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	kec pagentan	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi	12 dokumen	65.000.000	Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi	kec pagentan	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi	12 dokumen	65.000.000	Dalam RKPD akhir Tahun 2024 anggaran yang tersedia

			keuanga n SKPD			kasi Keuan gan SKPD		keuanga n SKPD			baru cukup untuk mebiayai 6 bulan
c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	kec pagentan	Jumlah Laporan Keuanga n Bulanan / Triwulan an/ Semester an SKPD dan Laporan Koordina si Penyusu nan Laporan Keuanga n Bulanan /Triwula nan/Sem esteran SKPD	14 Laporan	6.900.000	Koordi nasi dan Penyu sunan Lapor an Keuan gan Bulan an / Triwul anan / Semes teran SKPD	kec pagen tan	Jumlah Laporan Keuanga n Bulanan / Triwulan an/ Semester an SKPD dan Laporan Koordina si Penyusu nan Laporan Keuanga n Bulanan /Triwula nan/Sem esteran SKPD	14 Laporan	2.000.000	
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	kec pagentan	Persenta se Administ rasi	100%	100.000.00 0	Admin istrasi Umum Peran	kec pagen tan	Persenta se Administ rasi	100%	115.000.00 0	

			Umum Perangk t Daerah yang terlaksan a			gkat Daera h		Umum Perangk t Daerah yang terlaksan a			
a.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kec pagentan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	15.000.000	Penye diaan Peralatan dan Perlen gkapa n Kantor	kec pagen tan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	15.000.000	
b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	kec pagentan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 paket	85.000.000	Penye diaan Bahan Logistik Kantor	kec pagen tan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 paket	100.000.000	
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kec pagentan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	100%	80.000.000	Penga daan Barang Milik Daerah Penun jang Urusa	kec pagen tan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	100%	80.000.000	

			Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia			n Pemerintahan Daerah		Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia			
a.	Pengadaan Mebel	kec pagentan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit	30.000.000	Pengadaan Mebel	kec pagentan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit	30.000.000	
b.	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya	kec pagentan	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan	50 unit	50.000.000	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya	kec pagentan	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan	50 unit	50.000.000	
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kec pagentan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	100%	157.200.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusa	kec pagentan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	100%	157.200.000	

			Urusan Pemerintahan Daerah			n Pemerintahan Daerah		Urusan Pemerintahan Daerah			
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	kec pagentan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	7.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	kec pagentan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	7.200.000	Biaya Listrik per bulan @ 600.000
b.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	kec pagentan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	150.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	kec pagentan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	150.000.000	
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	kec pagentan	Persentase Pemeliharaan	100%	100.000.000	Pemeliharaan	kec pagentan	Persentase Pemeliharaan	100%	95.000.000	

	Daaerah		raan Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Daerah			Baran g Milik Daera h Penun jang Urusa n Daaer ah		raan Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Daerah			
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	kec pagentan	Jumlah Kendara an Dinas Operasio nal atau Lapanga n yang Dipelihar a dan dibayark an Pajak dan Perizinan nya	8 Unit	22.500.000	Penye diaan Jasa Pemeli haraa n, Biaya Pemeli haraa n, Pajak, dan Perizin an Kenda raan Dinas Opera sional atau Lapan gan.	kec pagen tan	Jumlah Kendara an Dinas Operasio nal atau Lapanga n yang Dipelihar a dan dibayark an Pajak dan Perizinan nya	8 Unit	22.500.000	Belanja servis sepeda motor belum terdanai
b.	Pemeliharaan/	kec	Jumlah	2 Unit		Pemeli	kec	Jumlah	2 Unit		Biaya

	Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pagentan	Gedung Kantor dan Banguna n Lainnya yang Dipeliha ra/Direha bilitasi		60.000.000	haraa n/ Rehab ilitasi Gedun g Gedun g Kantor dan Bang unan Lainny a	pagen tan	Gedung Kantor dan Banguna n Lainnya yang Dipeliha ra/Direha bilitasi		60.000.000	Pemeliha raan baru sebagian .
c.	Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	kec pagentan	Jumlah Sarana dan Prasaran a Gedung Kantor atau Banguna n Lainnya yang Dipeliha ra/Direha bilitasi	10 unit	17.500.000	Pemeli haraa n/Reh abilita si Saran a dan Prasar ana Gedun g Kantor dan Bang unan Lainny a	kec pagen tan	Jumlah Sarana dan Prasaran a Gedung Kantor atau Banguna n Lainnya yang Dipeliha ra/Direha bilitasi	10 unit	12.500.000	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN	kec pagentan	Persenta se	100%	102.500.0	PROG RAM	kec pagen	Persenta se	100%	102.500.00	

	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Penyele nggaraa n Pemerin tahan dan Pelayana n Publik		00	PENY ELEN GGAR AAN PEME RINTA HAN DAN PELA YANA N PUBLI K	tan	Penyele nggaraa n Pemerin tahan dan Pelayana n Publik		0	
1.	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	kec pagentan	Persenta se Terselen ggaranya Koordina si Pemeliha raan Sarana dan Prasana Pelayana n Umum	100%	20.000.000	Koordi nasi Pemeli haraa n Prasar ana dan Saran a Pelaya nan Umum	kec pagen tan	Persenta se Terselen ggaranya Koordina si Pemeliha raan Sarana dan Prasana Pelayana n Umum	100%	20.000.000	Belum terdanai
a.	Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	kec pagentan	Jumlah Dokume n Koordina si sinergita s dengan	6 dokume n	20.000.000	Koordi nasi sinergi tas denga n Peran	kec pagen tan	Jumlah Dokume n Koordina si sinergita s dengan	6 dokume n	20.000.000	Belum terdanai

	Pelayanan Umum		Perangka t Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliha haan Sarana dan Prasaran a Pelayana n Umum			gkat Daera h dan atau Instan si Vertik al yang terkait dalam Pemeli haraa n Saran a dan Prasar ana Pelaya nan Umum		Perangka t Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliha haan Sarana dan Prasaran a Pelayana n Umum			
2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	kec pagentan	Persenta se Pelaksan aan Urusan Pemerint ahan yang Dilimpah kan kepada Camat	100%	82.500.000	Pelaks anaan Urusa n Pemer ntaha n yang Dilimp ahkan kepad a Camat	kec pagen tan	Persenta se Pelaksan aan Urusan Pemerint ahan yang Dilimpah kan kepada Camat	100%	82.500.000	

a.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perijinan Non Usaha	kec pagentan	Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	150 dokumen	7.500.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perijinan Non Usaha	kec pagentan	Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan.	150 dokumen	7.500.000	Belum terdani
b.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Non Perizinan	kec pagentan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 laporan	10.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Non Perijinan	kec pagentan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 laporan	12.500.000	

c.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	kec pagentan	Jumlah laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	1 laporan	65.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	kec pagentan	Jumlah laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	1 laporan	65.000.000	
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	kec pagentan	persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat dan desa	100%	10.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	kec pagentan	persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat dan kelurahan yang terlaksana	100%	15.000.000	Belum terdani
1.	Pemberdayaan Lembaga	kec pagentan	terselenggaranya	100%	10.000.000	Pemberdayaa	kec pagen	persentase	100%	15.000.000	Belum terdani

	KemasyarakatanTingkat Kecamatan		pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan			n Lembaga KemasyarakatanTingkat Kecamatan	tan	pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan			
a.	Peningkatan Kapasitas lembaga kemasyarakatan	kec pagentan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	1 lembaga kemasyarakatan	10.000.000	Peningkatan Kapasitas lembaga kemasyarakatan	kec pagentan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	1 lembaga kemasyarakatan	15.000.000	Belum terdani
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	kec pagentan	Persentase Penyelesaian Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana	100%	15.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	kec pagentan	Persentase Penyelesaian Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana	100%	12.000.000	Belum terdani
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	kec pagentan	Persentase Penyelen	100%	15.000.000	Penyelenggaraan	kec pagentan	Persentase Penyelen	100%	12.000.000	Belum terdani

	Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah		ggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana			Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah		ggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana			
a.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	kec pagentan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	15.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	kec pagentan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	12.000.000	
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	kec pagentan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang	100%	101.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN	kec pagentan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang	100%	114.000.000	Baru satu sub kegiatan Pilkades yang terdanai

			terlaksana			HAN DESA		terlaksana			
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	kec pagentan	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	100%	101.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	kec pagentan	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	100%	114.000.000	Baru satu sub kegiatan pilkades yang terdanai
a.	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan kepala desa	kec pagentan	Jumlah dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala	32 dokmen	5.000.000	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan kepala desa	kec pagentan	Jumlah dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala	32 dokmen	5.000.000	Belum terdanai

			Desa					Desa			
b.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	kec pagentan	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administ rasi Tata Pemerint ahan Desa	16 Dokume n	6.000.000	Fasilit asi Admin istrasi Tata Pemerint ahan Desa	kec pagen tan	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administ rasi Tata Pemerint ahan Desa	16 Dokume n	6.000.000	Belum terdanai
c.	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	kec pagentan	Jumlah Dokume n yang di fasilitasi dalam rangka Pelaksan aan Pemiliha n Kepala Desa	3 dokume n	60.000.000	Fasilit asi Pelaks anaan Pemili han Kepala Desa	kec pagen tan	Jumlah Dokume n yang di fasilitasi dalam rangka Pelaksan aan Pemiliha n Kepala Desa	3 dokume n	75.000.000	
d.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	kec pagentan	Jumlah Dokume n yang di fasilitasi dalam rangka Pengelola an Keuanga	10 dokume n	11.000.000	Fasilit asi Pengel olaan Keuan gan Desa dan Penda yagun	kec pagen tan	Jumlah Dokume n yang di fasilitasi dalam rangka Pengelola an Keuanga	10 dokume n	11.000.000	Belum terdanai

			n Desa dan Pendaya gunaan Aset Desa			aan Aset Desa		n Desa dan Pendaya gunaan Aset Desa			
e.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	kec pagentan	Jumlah dokumen Sinkroni sasi Perencan aan Pembang unan Daerah dengan Pembang unan Desa	1 dokume n	14.000.000	Fasilit asi Sinkro nisasi Perenc anaan Pemba nguna n Daera h denga n Pemba nguna n Desa	kec pagen tan	Jumlah dokumen Sinkroni sasi Perencan aan Pembang unan Daerah dengan Pembang unan Desa	1 dokume n	12.000.000	Belum terdanai
f.	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	kec pagentan	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelen ggaraan Ketenter aman dan	9 dokume n	5.000.000	Fasilit asi Penyel enggara an Ketent erama n dan Keterti ban	kec pagen tan	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelen ggaraan Ketenter aman dan	9 dokume n	5.000.000	Belum terdanai

			Ketertiba n Umum			Umum		Ketertiba n Umum			
	TOTAL				2.749.100.00 0					2.756.000.0 00	

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

1. Memprioritaskan kegiatan yang belum terlaksana di tahun 2022
2. Melanjutkan kegiatan yang sudah ada di tahun 2022
3. Beberapa kegiatan yang belum terdanai sepenuhnya agar menjadi prioritas pendanaan dan penambahan pagu anggaran sehingga tidak mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	NIHIL				

2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi, maka Kecamatan Pagentan melaksanakan kebijakan daerah yang sinergis dengan kebijakan Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat. Kegiatan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Wanayasa diharapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan di atasnya, mempunyai rasa keadilan, pemerataan dan diarahkan agar implementasinya akan dapat berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Pagentan. Renja yang disusun perangkat daerah berpedoman pada RKPD dan kebijakan nasional. Agenda pembangunan nasional yang termuat dalam RPJMN 2020-2024 dengan tema pembangunan: "Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi Yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan" adalah meliputi : a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan; c. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing; d. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; g. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Sebagai bagian dari tahapan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, maka RPD Tahun 2023-2026 mempedomani RPJPD Tahun 2005-2025, khususnya tahapan keempat dalam penyusunannya. Untuk itu diperlukan pemahaman mengenai visi RPJPD Tahun 2005-2025. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Visi pembangunan dalam RPJPD Tahun 2005-2025 adalah: BANJARNEGARA MAJU BERBASIS PERTANIAN Visi Pembangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 ini mengarah pada pencapaian tujuan, cita-cita dan harapan masyarakat Kabupaten Banjarnegara. Visi pembangunan daerah tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, kesejahteraan, dan kelestarian yang ingin dicapai. Oleh karena itu, perlu kiranya diberikan penjelasan makna

visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan substansi filosofis yang terkandung, sehingga segenap pemangku kepentingan secara sinergis dan optimal dapat memberikan kontribusi dalam rangka pencapaiannya.

Misi yang akan dilaksanakan merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya adalah:

1. Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai-nilai luhur agama dan budaya masyarakat
2. Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah melalui sektor pertanian yang berorientasi pada pasar dengan senantiasa menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dalam pengelolaannya melalui regulasi yang tepat dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab.
4. Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar.

Dalam mencapai Visi Kabupaten Banjarnegara, maka Kecamatan Pagentan mempunyai peran dan fungsi menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan. Terutama dikaitkan dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola tugas-tugas pelayanan secara optimal, efektif dan efisien, serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya mewujudkan Visi Kabupaten Banjarnegara.

Adapun Misi yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pencapaian visi misi Kepala Daerah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Pagentan sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara dari lima misi tersebut adalah Misi Ketiga yaitu :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab.

Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab, serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Dengan kata lain tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Tujuan dan sasaran dalam Renstra yang mendukung RPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 diuraikan sebagai berikut:

Tujuan 5: Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Sasaran:

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan

Tujuan 6: Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik

Sasaran:

Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan public untuk urusan kewilayahan

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pagentan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahannya	Nilai SAKIP Kecamatan	61	CC (56)	B (63,20)	B (65,20)	BB (70,5)
2	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	Meningkatnya efektifitas dan transparansi layanan publik untuk urusan kewilayahannya	Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	86	83,20	85,05	85,90	86

3.3. Program dan Kegiatan
(Sajikan matriks yang berasal dari SIPD)

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN PAGENTAN KAB. BANJARNEGARA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN PAGENTAN						2.756.000.000,00							3.691.500.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.756.000.000,00							3.691.500.000,00	
	7.01	KECAMATAN						2.756.000.000,00							3.691.500.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	2.445.800.000,00						-	3.092.500.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	-			100 %	4.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Banjarnegara	-	13.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	2.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Banjarnegara		6.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	2.500.000,00	- Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Banjarnegara		7.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	1.745.561.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Banjarnegara	-	2.337.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	1.671.381.400,00	- Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	Masyarakat Kabupaten Banjarnegara		2.250.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	72.180.000,00	- Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	Masyarakat Kabupaten Banjarnegara		80.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				14 Laporan	2.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	Masyarakat Kabupaten Banjarnegara		7.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	123.815.000,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	Masyarakat Kabupaten Banjarnegara	-	125.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	20.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	Masyarakat Kabupaten Banjarnegara		20.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				7 Paket	103.815.000,00	- Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	Masyarakat Kabupaten Banjarnegara		105.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia</i>	-			100 %	199.900.600,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	Masyarakat Kabupaten Banjarnegara	-	200.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				4 Unit	88.366.200,00	- Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	Masyarakat Kabupaten Banjarnegara		100.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				50 Unit	111.534.400,00	- Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan	Masyarakat Kabupaten Banjarnegara		100.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 %	139.154.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Banjarnegara	-	173.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Banjarnegara		13.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	127.154.300,00	- Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Banjarnegara		160.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 %	232.868.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Banjarnegara	-	244.500.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				8 Unit	25.265.200,00	- Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Banjarnegara		27.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	194.977.500,00	- Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Banjarnegara		197.500.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				10 Unit	12.626.000,00	- Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Banjarnegara		20.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</i>	-			100 %	105.000.000,00						-	121.000.000,00	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	<i>Persentase terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>	-			100 %	20.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Banjarnegara	-	22.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum														
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</i>				6 Dokumen	20.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Banjarnegara		22.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	-			100 %	85.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Banjarnegara	-	99.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			<i>Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan</i>				150 Dokumen	7.500.000,00	- Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Banjarnegara		12.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan</i>				12 Laporan	12.500.000,00	- Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Banjarnegara		17.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>				1 Laporan	65.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Banjarnegara		70.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</i>	-			100 %	27.000.000,00						-	30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	<i>Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>	-			100 %	27.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Banjarnegara	-	30.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				1 Lembaga Kemasyarakat an	27.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Banjarnegara		30.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</i>	-			100 %	16.200.000,00						-	18.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah</i>	-			100 %	16.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Banjarnegara	-	18.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>				4 Dokumen	16.200.000,00	- Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Banjarnegara		18.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	-			100 %	162.000.000,00						-	430.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	-			100 %	162.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Banjarnegara	-	430.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				32 Dokumen	15.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Banjarnegara		17.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				16 Dokumen	20.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Banjarnegara		27.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				10 Dokumen	20.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Banjarnegara		22.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				3 Dokumen	75.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Banjarnegara		325.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	12.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Banjarnegara		14.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				9 Dokumen	20.000.000,00	- Kab. Banjarnegara, Pagentan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Banjarnegara		25.000.000,00	KECAMATAN PAGENTAN
	JUMLAH							2.756.000.000,00							3.691.500.000,00	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2023-2026. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan di Kecamatan Pagentan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 6 (enam) kegiatan yakni
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
 - a.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - a.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan
 - b.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b.2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
 - b.3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah. Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
 - c.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c.2. Penyedia bahan logistik kantor
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
 - d.1. Pengadaan Mebel
 - d.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
 - e.1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - e.2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :
 - f.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,

- Pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - f.2. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya
 - f.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, 2 (dua) kegiatan yakni :
 - a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum. Terdiri dari 1 (satu) sub Kegiatan :
 - a.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang di Limpahkan Kepada Camat. Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :
 - b.1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan perizinan non usaha
 - b.2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan
 - b.3. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan 1 (satu) kegiatan :
 - a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan :
 - a.1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
- 4. Program Urusan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan 1 (satu) kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah. Terdiri dari 1 (satu) sub Kegiatan :
 - a.1. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di wilayah kecamatan
- 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Desa, dengan dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Terdiri dari 6 (enam) sub Kegiatan :
 - a.1. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan

kepala desa

- a.2. Fasilitasi administrasi pemerintahan desa
- a.3. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- a.4. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa
- a.5. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum
- a.6. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2022-2026. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah tahun 2022-2026. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal : 2 Januari 2024
CAMAT PAGENTAN,



HARIATUMBINUKO, SP, M.Si
Pembina
NIP. 196901181996031004